



Krisis Politik dan Konflik Kepentingan di Suriah

Humphrey Wangke^{*)}

Abstrak

Transisi demokrasi yang terjadi di negara-negara Timur Tengah menghadapi tantangan ketika sebuah rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang bertujuan untuk mengakhiri pergolakan politik di Suriah ditolak oleh Rusia dan China. Penolakan ini memperlihatkan, pihak-pihak yang bertikai di negara itu, baik pemerintah maupun oposisi, telah menggalang dukungan dari masyarakat internasional. Tanpa disadari dukungan semacam itu semakin mempertajam perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dengan oposisi. Akibatnya peluang terjadinya proses transisi demokrasi yang berlangsung secara damai semakin sulit tercapai.

Latar Belakang

Konstelasi politik internasional dalam minggu ini mengalami perkembangan yang menarik. Untuk pertama kalinya sebuah rancangan resolusi DK PBB, yang terkait dengan keinginan atau ambisi Amerika Serikat, gagal disahkan. Dalam perdebatan di DK PBB tanggal 4 Februari 2012, Rusia dan China secara mengejutkan menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan sebuah rancangan resolusi DK PBB terhadap Suriah. Rancangan resolusi yang disusun Liga Arab dan negara-negara Uni Eropa itupada intinya menghendaki agar Presiden Suriah Bashar al Assad segera menghentikan kekerasan di negaranya yang diperkirakan sudah menewaskan sedikitnya 5.400 orang dalam 10 bulan terakhir. Selain itu, rancangan resolusi ini juga mendesak Presiden Assad

agar segera menyerahkan kekuasaan kepada para deputinya.

Lahirnya resolusi itu didasari oleh pemikiran bahwa telah terjadi perubahan demokrasi di Suriah sehingga pemerintahan Presiden Assad harus segera digantikan oleh pemerintahan baru yang ditentukan oleh rakyat Suriah sendiri. Sebanyak 13 negara, termasuk Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, memberikan suara mendukung resolusi terhadap Suriah. Tetapi Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin menegaskan, PBB tidak memiliki mandat untuk menekankan sejumlah parameter penyelesaian dalam negeri suatu negara. Menurutnya, resolusi ini hanya meminta pergantian regim dan mendorong oposisi untuk berkuasa.

Duta Besar Cina di PBB Li Baodong mengatakan, seharusnya ada konsultasi

^{*)} Peneliti bidang Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: dhanny_2000@yahoo.com

sebelum PBB membuat keputusan itu. Memaksakan adanya pemilu saat negara masih terpecah belah dinilainya tak akan membantuterwujudnya persatuan di Suriah. Karena itu, menurutnya, rancangan resolusi DK PBB tanggal 4 Februari itu tidak efektif, bahkan dapat memecah-belah Suriah.

Tragedi Kemanusiaan di Suriah

Bukan yang pertama kali ini Suriah menghadapi masalah dalam negeri yang mengundang intervensi luar. Ketika Hafez al Assad, ayah dari Bashar al Assad, berkuasa, Suriah juga menarik perhatian internasional ketika terjadi kerusuhan di kota Hama tahun 1982 yang menewaskan ribuan orang. Tragedi itu terjadi ketika Presiden Hafez al Assad memerintahkan pasukannya untuk menghabisi demonstrasi yang digalang oleh kelompok *Muslim Brotherhood*. Kelompok ini berkembang pada tahun 1970-an di Hama sebagai cabang dari *Muslim Brotherhood* di Mesir.

Muslim Brotherhood menghendaki reformasi politik, termasuk diberikannya hak-hak sipil warga negara, pengakhiran penyiksaan yang biasa dilakukan oleh regim berkuasa terhadap siapa saja yang dianggap melawan, dan penegakan *rule of the law*. Pada bulan Februari 1982, *Muslim Brotherhood* menyerang unit militer Suriah yang sedang mencari anggota oposisi di Hama dan mengambil alih serta menguasai kota. Presiden Hafez al Assad menjawab aksi itu dengan mengirim 12.000 tentara.

Operasi penumpasan pemberontakan di Hama berlangsung selama 3 minggu. Hama dikepung tentara yang diperkuat kendaraan lapis baja dan tank. Helikopter-helikopter militer terus menerus menerjunkan pasukan dan menghancurkan wilayah pemukiman penduduk. Pertempuran di Hama berlangsung begitu sengit sehingga banyak pihak menyebutnya sebagai pertempuran yang menentukan. Sebab salah satu pihak yang memenangkan pertempuran diperkirakan akan mengambil alih kekuasaan.

Pertempuran di Hama ini pada akhirnya berubah menjadi perang saudara karena tentara yang berasal dari daerah itu membelot dan berbalik melawan pasukan pemerintah. Jumlah korban tewas dalam pertempuran itu hingga kini masih menjadi perdebatan. Mereka yang bersimpati kepada pemerintahan Hafez al Assad mengatakan bahwa korban tewas sekitar 3.000 orang. Namun para pengkritik Hafez al Assad mengatakan korban tewas mencapai 20.000 orang. Suriah akhirnya mendapat julukan sebagai negara polisi paling opresif di dunia.

Setelah sang ayah menguncang dunia dengan tragedi Hama, kini sang anak mengikuti jejak tersebut dengan peristiwa Homs. Kota Homs merupakan pusat pemberontakan dan revolusi selama 10 bulan terakhir, yang menuntut turunnya Presiden Bashar Al Assad. Serangan mortir yang dilakukan pasukan Suriah di Kota Homs pada hari Jum'at tanggal 2 Februari lalu telah menewaskan setidaknya 217 orang. Apa yang terjadi di kota Homs hanyalah salah satu dari sekian banyak aksi kekerasan oleh aparat keamanan Suriah yang menewaskan lebih dari 5000 orang tewas di seluruh negeri sejak demonstrasi yang menuntut Suriah lebih demokratis dan pluralis dimulai awal tahun 2011. Karena itu, tidak kurang dari Sekjen PBB Ban Ki Moon memperingatkan Presiden Bashar al Assad agar berhenti membantai rakyatnya sendiri. Menurut Ba Ki Moon, angin perubahan telah berhembus kencang di Suriah sehingga tidak ada gunanya dihentikan dengan aksi-aksi kekerasan.

Namun pemerintah Suriah dengan tegas menolak segala bentuk intervensi asing, atas nama siapapun. Kini setelah Rusia dan China memveto Resolusi DK PBB, bukan mustahil tragedi Hama akan terulang lagi. Perang saudara bisa terjadi lagi. Jika itu terjadi, dunia menuntut agar Rusia dan Cina ikut bertanggung jawab. Sebab pada kenyataannya situasi dalam negeri Suriah tidak semakin membaik pasca penolakan resolusi PBB tersebut. Hanya dua hari setelah penolakan itu, pada tanggal 6 Februari 2012 pasukan Suriah kembali menyerang kelompok pemberontak di Kota Homs hingga menewaskan 95 warga sipil.

Memajukan Demokrasi atau Perebutan Kekuasaan

Dalam 10 bulan terakhir ini Presiden Bashar al Assad harus menghadapi unjuk rasa yang menentang kepemimpinannya. Ia menjuluki para pendemo sebagai teroris karena kegiatan yang dilakukannya dianggap sebagai konspirasi asing. Meskipun telah berkuasa selama 11 tahun tetapi Presiden Assad tidak mau meninggalkan tampuk kekuasaannya. Ia bertekad untuk terus mengatasi berbagai aksi kerusuhan di negaranya dengan kekuatan yang dimilikinya, meskipun untuk itu akan lebih banyak lagi korban yang berjatuh. Di lain sisi, ia juga berjanji untuk membiarkan rakyat Suriah menentukan pilihannya pada bulan Maret mengenai konstitusi baru yang akan memusatkan perhatian pada sistem multipartai. Ia mengatakan pemilu parlemen akan menyusul dan bisa diselenggarakan paling cepat bulan Mei 2012.

Namun apa yang dijanjikan Presiden Assad itu gagal mengurangi semangat para pemberontak. Pemimpin oposisi Suriah yang mengasingkan diri ke Turki, Omar al Muqdad mengingatkan para penguasa otoriter di kawasan Timur Tengah agar memperhatikan apa yang terjadi dengan pemimpin Libya Muammar Khadafi, yaitu siapapun yang membunuh rakyatnya sendiri akan berakhir seperti itu. Pemimpin Dewan Nasional Suriah itu tidak lupa mendorong rakyat Suriah agar menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al Assad.

Kematian Khadafi telah memberi efek domino seperti halnya *Arab Spring*. Sebab, revolusi yang pertama kali terjadi di Tunisia itu kemudian menjalar ke Mesir, kemudian berlanjut ke Yaman dan Libya. Meskipun negara-negara Barat mendukung digulingkannya Presiden Assad, namun banyak faktor lokal yang menghambat seperti kelas menengah yang tidak bersatu menjadi oposisi.

Dalam konteks di atas terlihat bahwa apa yang dikatakan Dubes Rusia di PBB bahwa mereka yang mendukung resolusi DK PBB hanya meminta pergantian regim dan mendorong oposisi berkuasa, sangat beralasan. Namun sebaliknya sikap Rusia itu juga memperlihatkan dukungannya untuk mempertahankan regim yang berkuasa.

Sebab Rusia merupakan pemasok utama senjata bagi Suriah. Seperti pada tanggal 10 Januari 2012 lalu, sebuah kapal kargo Rusia yang berisi senjata sempat berhenti di Lamasol, Siprus, karena cuaca buruk. Kapal tersebut membawa berton-ton amunisi untuk pasukan Suriah. Setelah berada di Limasol selama beberapa jam, kapal tersebut melanjutkan perjalanan dan tiba di Pelabuhan Tartus, Suriah, beberapa hari kemudian. Diperkirakan, sepuluh persen penjualan senjata Rusia secara global masuk ke negara sekutunya itu. Kontrak penjualan senjata itu bernilai 1,5 miliar dolar AS.

Selain amunisi, penjualan senjata Rusia ke Suriah itu termasuk pesawat latih militer, sistem pertahanan udara, dan senjata antitank. Pengamat meyakini, Rusia khawatir, jatuhnya Presiden Suriah Bashar al Assad akan menimbulkan kerugian hingga ratusan juta dolar AS. Apalagi, Suriah menjadi sekutu terakhir setelah pemimpin Libya, Muammar Khadafi dijatuhkan.

Sebaliknya Amerika Serikat yang sangat ingin Presiden Assad digulingkan, bergerak diluar payung PBB untuk menekan regim penguasa Suriah. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengusulkan agar dibentuk koalisi internasional di luar konteks payung PBB yang terdiri dari negara-negara sahabat rakyat Suriah untuk mendukung konsep perubahan di Suriah secara damai. Menurut Hillary Clinton, kelompok komunikasi sahabat Suriah ini mirip dengan kelompok komunikasi sahabat rakyat Libya yang berani menumbangkan regim Muammar Khadafi. Seruan Menlu AS ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Perancis Nicolas Sarkozy. Dukungan juga datang dari kelompok oposisi Suriah melalui Dewan Nasional Suriah (SNC) yang menyatakan niatnya untuk meminta Majelis Umum PBB mengeluarkan keputusan internasional yang mendukung rakyat Suriah serta mendukung pembentukan kelompok komunikasi internasional untuk mendukung perjuangan rakyat Suriah serta mengucilkan regim Bashar al Assad.

Lebih jauh Amerika Serikat juga menginginkan agar aliran senjata dan dana ke Suriah dapat dihentikan dengan menjatuhkan sanksi tambahan. Menurut AS, tekanan harus ditingkatkan serta memperberat sanksi nasional dan regional yang telah terjadi. Pemberlakuan sanksi

diharapkan dapat menguras sumber pendanaan dan pengapalan senjata sehingga pemerintah Suriah tidak menjadi mesin pembunuh. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyatakan bahwa AS akan mengungkap siapa saja yang masih mendanai regim Assad dan mengirimkan senjata untuk pasukan keamanan Suriah.

Bahkan Senator Joe Lieberman mengusulkan agar ada opsi militer untuk mengakhiri kekuasaan Assad. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan dukungan pada tentara Suriah yang membelot dan melakukan perlawanan. Dewan Nasional Suriah (SNC) yang berposisi, melalui ketuanya Burhan Ghalioun, menilai, dukungan seperti itu kemungkinan dapat dilakukan jika diperlukan untuk melindungi rakyat Suriah. Demikian pula dengan Pasukan Pembebasan Suriah melalui Ketuanya Riad al Assad, mengatakan tidak ada jalan lain untuk memaksa Assad mundur selain melalui aksi militer.

Pemajuan demokrasi suatu negara saat ini pada kenyataannya harus ditandai dengan runtuhnya penguasa yang sedang berkuasa. Tanpa itu, apapun upaya yang dilakukan oleh sang penguasa tidak akan ada artinya. Seperti upaya perubahan konstitusi pada bulan Maret yang kemudian diikuti dengan penyelenggaraan pemilu pada bulan Mei seperti yang dicanangkan Presiden Assad nampaknya sudah sulit dipercaya. Kelompok oposisi sudah sangat ingin mengambil alih kekuasaan sebagai simbol perubahan. Kondisi demikian ini yang sedang dimanfaatkan oleh negara-negara besar untuk mengambil keuntungan.

Pemerintah Indonesia yang berpengalaman dalam pengelolaan konflik di kawasan Asia Tenggara kiranya dapat memberikan sumbangan pikiran dalam penyelesaian konflik di Suriah melalui jalur-jalur yang mungkin dapat

dilakukan. Misalnya melalui Organisasi Negara-negara Kerja Sama Islam (OKI) atau melalui perwakilan Indonesia di PBB. Pengalaman Indonesia dalam mengatasi masalah peralihan kekuasaan tahun 1998 secara damai dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Suriah untuk menyelesaikan masalah dalam negerinya secara damai tanpa campur tangan asing. DPR RI pun melalui diplomasi parlementernya, seperti melalui Uni Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PUIC), dapat bertukar pengalaman dengan parlemen Suriah guna mencari solusi damai di negara tersebut.

Kesimpulan

Semua negara di dunia, termasuk Indonesia, harus berhati-hati dalam mengelola setiap konflik politik yang terjadi di dalam negeri. Keterlibatan pihak asing dalam konflik tersebut seringkali hanya akan memperkeruh suasana, sebab dukungan yang diberikan kepada pihak-pihak yang bertikai lebih didasarkan pada kepentingannya. Sebaliknya, pemerintah yang otoriter juga harus menyadari bahwa isu demokratisasi dan pluralisme telah menjadi *icon* perjuangan rakyat untuk memperoleh kembali hak-haknya.

Rujukan:

1. Barat dan Arab Terpengaruh, *Kompas*, 7 Februari 2012.
2. AS: Hambat Aliran Senjata ke Suriah, *Republika*, 7 Februari 2012.
3. Masa Depan Suriah, *Kompas*, 6 Februari 2012.
4. Suriah Makin Panas, *Republika*, 8 Februari 2012.
5. Oposisi Suriah Diajak Dialog, *Republika*, 9 Februari 2012.
6. Genosida Menyapu Homs, *Republika*, 9 Februari 2012.